



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-11.AH.11.02 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN RAKYAT (PKR)  
PERIODE 2022-2027

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor 09/A/DPP-PKNU/IV/2022, tanggal 25 April 2022, perihal Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) serta Kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Periode 2022-2027 Hasil Muktamar Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
  - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Periode 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

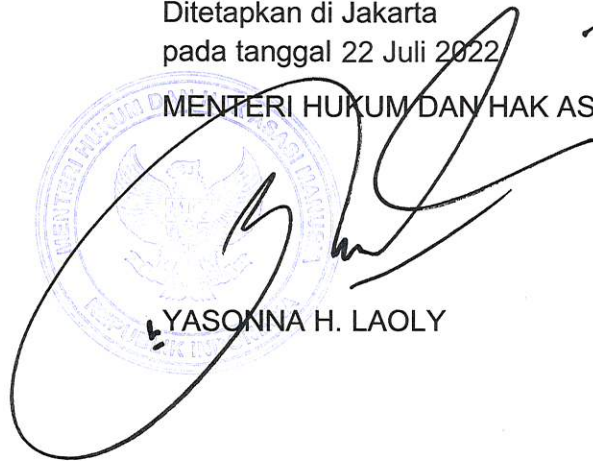
**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN RAKYAT (PKR) PERIODE 2022-2027.
- KESATU** : Mengesahkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Rakyat (PKR) Periode 2022-2027, dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat 10430, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 33, tanggal 22 April 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus Partai Keadaulatan Rakyat (PKR) (dahulu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)) Periode 2022-2027, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Rakyat (PKR) Periode 2022-2027 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2013, tanggal 15 November 2013, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2022

Tanggal : 22 Juli 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN RAKYAT (PKR)  
PERIODE 2022-2027**

**DEWAN PEMBINA**

KETUA : Tuntas Subagyo, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen;  
WAKIL : Supriyanto;

**DEWAN PENASEHAT**

KETUA : Insinyur Joko Dalmadyo;  
WAKIL : Asmono;

**DEWAN PAKAR**

KETUA : Doktorandus Choirul Anam;  
WAKIL : Bakrun;  
ANGGOTA : Bambang Purwoadi;

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

KETUA UMUM : Tuntas Subagyo, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen;  
SEKRETARIS JENDERAL : Sigit Prawoso, Sarjana Pendidikan;  
WAKIL SEKRETARIS : Maman Lesmana;  
JENDERAL DEPARTEMEN  
INTERNAL  
WAKIL SEKRETARIS : Susiloadji;  
JENDERAL DEPARTEMEN  
UMUM  
WAKIL SEKRETARIS : Budi Suprayogi;  
JENDERAL DEPARTEMEN  
PEMERINTAHAN  
BENDAHARA UMUM : Bambang Wicaksono Imam Suwongso;  
WAKIL BENDAHARA UMUM : Erni Setyowati;  
INTERNAL  
WAKIL BENDAHARA UMUM : Diana Fatmawati;  
PROGRAM

**STRUKTUR KETUA DPP DEPARTEMEN PEMENANGAN PEMILU:**

KETUA : Robert Hananto;  
WAKIL : Zaenul Khakim;

**DEPARTEMEN IDEOLOGI DAN KADERISASI:**

KETUA : Sutrisno;  
WAKIL : Dwi Yuni Kristiyanawati;

**DEPARTEMEN KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI:**

KETUA : Muhammad Arif;  
WAKIL : Nandir;

DEPARTEMEN POLITIK DAN KEAMANAN:

KETUA : Moh Qomarudin, Sarjana Pendidikan;  
WAKIL : Riyanto Kenzis;

DEPARTEMEN HUKUM HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN:

KETUA : Budi Yowono, Sarjana Hukum;  
WAKIL : M. Yasin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora;

DEPARTEMEN PEREKONOMIAN:

KETUA : Hendri Hendradi;  
WAKIL : Elis Suprihatin;

DEPARTEMEN PANGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP:

KETUA : Sukasmo;  
WAKIL : Feti Inawati;

DEPARTEMEN KELAUTAN, PERIKANAN DAN NELAYAN:

KETUA : Heri Rofiadi, Sarjana Ekonomi;  
WAKIL : Siti Nadziroh;

DEPARTEMEN ANTAR PROVINSI DAN LUAR NEGERI:

KETUA : Sadrack;  
WAKIL : Khusnul Khotimah;

DEPARTEMEN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA

KETUA : Sri Pujiyono;  
WAKIL : Y. Sri Rahayu;

DEPARTEMEN INDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN:

KETUA : Tangky Megah Saputra;  
WAKIL : Andrias Tato Toding;

DEPARTEMEN KESEHATAN IBU DAN ANAK:

KETUA : Siswaningsih;  
WAKIL : Listyowati;  
Utin Sihwanti;

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN:

KETUA : Edi Widodo;  
WAKIL : Bagyo Wahyono;  
Rudjuk Femindari;

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:

KETUA : Doktorandus Kasmoyo;  
WAKIL : Sri Marlina;  
Tuti Handayani;

DEPARTEMEN PARIWISATA:

KETUA : Wajiman;  
WAKIL : Oslan Yunus;

DEPARTEMEN PEMUDA DAN OLAH RAGA:

KETUA : Kharis Riyadi;  
WAKIL : Parti;  
Umi Aminah;

DEPARTEMEN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA : Ali Sodikin;  
WAKIL : Yoshua Setiawan;

DEPARTEMEN UMKM, EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI DIGITAL:

KETUA : Herjunadi Kurniawan;  
WAKIL : Yoma Dina Kamala;  
Siti Nurhayati.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY